

MENGEMBALIKAN STATUS WILAYAH NUSA TENGGARA SEBAGAI GUDANG TERNAK

Edi Basuno

*Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian
Jl. A. Yani 70 Bogor*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian telah terbukti mampu berperan ditengah badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia sampai saat ini. Selain diharapkan menyediakan bahan pangan bagi penduduk, sektor ini juga mendapat beban lain, yaitu penyediaan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk. Bahkan pertanian harus siap pula untuk menghadapi sistem perdagangan global yang segera akan diberlakukan. Berbagai tantangan di atas memerlukan akselerasi pembangunan pertanian agar pertanian benar-benar menjadi dambaan petani, artinya individu yang menekuni bidang pertanian memperoleh imbalan yang memadai dari usaha taninya.

Di Nusa tenggara yang meliputi wilayah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah. Di NTT misalnya, sekitar 70-80 persen penduduk Nusa Tenggara, mengandalkan sumber nafkah utama pada sektor pertanian dan sekitar 40 persen PDRB merupakan sumbangan dari sektor pertanian (Anonim, 1997). Dari angka tersebut, subsektor peternakan sendiri menyumbang sebesar 10-12 persen (Bamualim, 1994). Tabel 1 sampai dengan Tabel 4 memperlihatkan populasi sapi di Nusa Tenggara, pengeluaran sapi, PDRB peternakan dan pertanian dari masing-masing provinsi.

Ternak sapi merupakan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif di wilayah Nusa Tenggara karena dukungan lahan penggembalaan, semak belukar, hutan dan limbah pertanian. Sistem pemeliharaan ternak sebagian besar masih secara ekstensif tradisional dan perannya dalam ekonomi keluarga merupakan usaha sampingan, setelah tanaman pangan. Namun demikian, di beberapa daerah yang usaha tanaman pangannya berkembang, peternakan sudah dikelola secara lebih intensif dengan penyediaan pakan atau mengikat ternak di padang penggembalaan pada siang hari dan malam hari dikandangan (Rangkuti dan Siregar, 1997 dan Liem *et al.*, 2000). Oleh karena itu, usaha peternakan mempunyai prospek yang menggembirakan. Populasi sapi berkembang pesat, sehingga sejak lama Nusa Tenggara telah menjadi pemasok sapi potong dan sapi bibit bagi daerah lainnya di Indonesia. Di NTT misalnya, sapi Bali mendominasi di Pulau Timor dan Flores dan sapi Ongole di Pulau Sumba.

Tabel 1. Populasi Sapi Potong (ekor) di Wilayah Nusa Tenggara, 1998 -2002

Tahun	Provinsi			Nusa Tenggara	Indonesia
	Bali	NTB	NTT		
1998	524.615	429.847	715.704	1.670.166	11.472.772
1999	526.013	374.940	726.439	2.960.102	11.275.703
2000	529.074	376.426	485.329	1.390.829	11.008.017
2001	521.264	395.051	495.051	1.411.366	11.137.701
2002	523.870	403.589	502.589	1.430.048	11.297.625

Sumber: Buku Statistik Peternakan, 2002.

Tabel 2. Pengeluaran Sapi Potong (ekor) dari Wilayah Nusa Tenggara, 1998 -2002

Tahun	Provinsi			Jumlah
	Bali	NTB	NTT	
1998	61.015	22.705	47.890	70.595
1999	0	27.143	64.070	91.213
2000	0	16.989	26.693	43.682
2001	0	15.675	55.560	71.235
2002	0	0	40.000	40.000

Sumber: Sumber: Buku Statistik Peternakan, 2002.

Tabel 3. Angka PDRB Peternakan di Nusa Tenggara Menurut Harga yang Berlaku
(Rp. 1000)

Tahun	Provinsi			Nusa Tenggara	Indonesia
	Bali	NTB	NTT		
1997	521.940	196.670	458.361	1.176.971	11.299.427
1998	883.424	384.602	549.867	1.817.893	15.965.466
1999	898.799	412.070	647.112	1.957.981	19.931.215
2000	964.555	458.473	681.641	2.104.669	23.302.114
2001	1.118.101	528.257	771.099	2.417.457	28.495.430

Sumber: Sumber: Buku Statistik Peternakan, 2002.

Tabel 4. Angka PDRB Pertanian di Nusa Tenggara Menurut Harga yang Berlaku.
(Rp. 1000)

Tahun	Provinsi			Nusa Tenggara	Indonesia
	Bali	NTB	NTT		
1997	1.913.137	1.629.943	1.750.396	5.293.476	95.298.842
1998	3.152.330	3.153.003	2.039.760	8.345.093	165.261.678
1999	3.211.018	3.213.132	2.489.112	8.913.262	191.867.560
2000	3.403.269	3.296.156	2.756.710	9.456.135	214.941.392
2001	3.923.884	3.923.884	3.189.006	10.742.476	243.936.771

Sumber: Sumber: Buku Statistik Peternakan, 2002.

Khusus di Pulau Sumba, perkembangan sapi Ongole yang mulai diintroduksi pada tahun 1914 dalam jumlah sekitar 1.000 ekor ternyata tidak terlalu sukses, karena saat ini populasinya baru mencapai sekitar 50.000 ekor (Anonym 1999). Namun dengan pertimbangan untuk melestarikan sumber plasma nutfah, maka kebijakan pemurnian Ongole masih tetap berlaku hingga sekarang (Wirdahayati *et al.*, 1997 dan Nono *et al.*, 2000).

Kasus dari NTT menunjukkan bahwa dari aspek penggunaan lahan bervariasi, Pulau Sumba dan Timor mempunyai lahan kering yang cukup luas dengan topografi yang relatif hampir sama dan berpotensi untuk digunakan sebagai pengembangan ternak sapi potong. Potensi luas lahan penggembalaan di Pulau Sumba terluas di NTT, yakni 405.465 ha, dengan daya dukung lahan untuk peternakan seluas 5,3 ha per unit ternak (Bamualim dan Wirdahayati, 1996). Dengan sistem ekstensif yang diperbaiki, lahan ini dapat dipergunakan untuk pemeliharaan ternak sapi. Cara ini paling efektif untuk meningkatkan populasi di Pulau Sumba yang daya dukungan lahannya masih relatif tinggi. Permasalahan perkembangan populasi sapi Ongole yang lambat telah dapat diidentifikasi dan ditemukan terobosan teknologi untuk meningkatkan produktivitas sapi Ongole di Pulau Sumba. Di Pulau Timor dan Flores di NTT, Pulau Lombok dan Sumbawa di NTB dan Pulau Bali, perlu diterapkan sistem usaha pemeliharaan yang lebih intensif yang didukung oleh pengembangan pakan secara besar-besaran dan berkelanjutan, baik melalui penanaman jenis-jenis pakan yang bermutu tinggi, menggali potensi lokal maupun pemanfaatan limbah dan hasil ikutan pertanian.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah mengapa potensi yang demikian besar tersebut belum menjadikan ternak sebagai andalan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara, padahal teknologi peternakan banyak tersedia dan permintaan daging terus meningkat. Seharusnya hal-hal ini merupakan insentif bagi masyarakat untuk beternak. Tampaknya yang menjadi benang merah disini adalah perlunya program di tingkat provinsi dalam pemberdayaan masyarakat peternak. Pemberdayaan meliputi antara lain pengembangan kelompok dari bawah, belajar berorganisasi yang benar, membuat perencanaan kelompok, mengupayakan permodalan dan memahami makna agribisnis. Dengan program pemberdayaan diharapkan masyarakat mampu mencari peluang usaha. Selama ini program-program peternakan lebih difokuskan pada aspek teknis, dengan menomorduakan aspek sumber daya manusia. Akibatnya, aplikasi teknologi di tingkat lapang relatif terbatas. Pemberdayaan masyarakat yang diinginkan adalah terwujudnya perubahan perilaku yang dapat membuat masyarakat menjadi kuat dan mandiri serta mengerti akan hak-haknya serta kewajibannya. Dari kegiatan pemberdayaan tidak menutup kemungkinan peternak di Nusa Tenggara menjadi pelaku agribisnis yang tangguh di masa datang.

Keinginan untuk mengembalikan status Nusa Tenggara sebagai gudang ternak seharusnya bukan menjadi slogan semata, tetapi merupakan keinginan dari seluruh jajaran Pemda di wilayah tersebut. Perlu disadari bahwa perwujudan keinginan tersebut bukan hal yang mudah, tetapi memerlukan keseriusan dan

perencanaan jangka panjang di pihak Pemda. Untuk wilayah Nusa Tenggara, upaya mulia ini kiranya dapat terwujud kalau pemberdayaan petani dijadikan program unggulan, minimal untuk lima tahun mendatang. Tulisan ini dimaksudkan agar dapat dijadikan motivasi Pemda di wilayah Nusa Tenggara di dalam mewujudkan kembalinya status gudang ternak.

STRATEGI PEMBANGUNAN PETERNAKAN MASA MENDATANG DI NUSA TENGGARA

Masyarakat di Nusa Tenggara seperti masyarakat wilayah Indonesia lainnya memerlukan sentuhan khusus agar perannya didalam pembangunan pertanian menjadi optimal. Hal ini mengingat sumberdaya pertanian seringkali dijadikan obyek, bukan subyek pembangunan. Selama lebih dari 30 tahun, proses pembangunan di Indonesia lebih diwarnai dengan pendekatan *top-down* yang erat kaitannya dengan budaya paternalistik yang berkembang. Namun dengan berjalannya waktu, terutama dalam era reformasi dan desentralisasi ini secara terbatas sudah mulai dilakukan reorientasi pembangunan, yakni dari pendekatan *top-down* ke pendekatan partisipatif yang lebih mengikutsertakan peran masyarakat. Pendekatan ini mulai banyak dilakukan oleh para pelaku pembangunan dengan alasan-alasan berikut ini (Oakley and Marsden, 1984): (a) mengurangi biaya pembangunan; (b) meningkatkan manfaat yang diperoleh masyarakat yang berpartisipasi; (c) memperbaiki kesalahan oleh para pengelola proyek/program; (d) meningkatkan kesadaran politik masyarakat; (e) seluruh komponen masyarakat memperoleh manfaat program; (f) mengurangi ketergantungan masyarakat, sehingga berbagai program akan lebih berlanjut dan masyarakat akan lebih percaya diri; (g) memperoleh peluang dan penguasaan terhadap sumberdaya; (h) terdapat mobilisasi sumber daya lokal untuk pelaksanaan program; (i) pelaksanaan program akan lebih mudah dan lancar; dan (j) partisipasi masyarakat akan menuju kepada pemberdayaan secara bertahap untuk kelompok-kelompok yang secara sosial ekonomi kurang beruntung.

Ada pun perbedaan antara pendekatan partisipatif dan pendekatan non-partisipatif dapat diamati pada Tabel 5 (Pretty, 1995).

Tabel 5. Perbandingan Pendekatan Partisipatif dan Pendekatan Nonpartisipatif

No	Pendekatan Partisipatif	Pendekatan Non-partisipatif
1.	Partisipasi	Instruksi
2.	Keterlibatan	Pengamatan
3.	Belajar sambil bekerja	Apa yang dikatakan guru
4.	<i>Bottom-up</i>	<i>Top-down</i>
5.	Pemilikan	Pekerjaan
6.	Pemberdayaan	Kepatuhan

Di sini ditekankan bahwa dengan partisipasi masyarakat ikut memiliki program yang sedang dilaksanakan. Hal ini akan memberi dampak positif terhadap aspek keberlanjutan. Berbagai program yang tidak berlanjut disebabkan antara lain masyarakat tidak merasa memilikinya, sebab program tersebut dirancang tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Pengalaman di masa lalu di dalam melaksanakan program pembangunan perlu diperbaiki, antara lain dengan melibatkan pihak Pemda dan masyarakat untuk aktif berpartisipasi. Kunci agar masyarakat merasa memiliki program adalah dilibatkannya di dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Lupakan petunjuk teknis dari pusat karena kenyataannya masing-masing wilayah mempunyai keunikannya sendiri-sendiri.

PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN PETERNAKAN

Pendekatan partisipatif didiskripsikan sebagai pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat mengambil bagian atau bersama-sama turut serta meningkatkan dan menganalisis kondisi kehidupan mereka sendiri agar dapat membuat rencana dan tindakan. Pada beberapa kasus, pendekatan partisipatif dimulai dengan orang luar dan apabila memungkinkan masyarakat setempat mengambil bagian, baik dalam pemahaman, analisis, tindakan, monitoring dan evaluasi. Apabila masyarakat miskin dapat melakukan proses perencanaan dengan baik diharapkan hal ini akan membawa mereka lebih menguasai kehidupan mereka sendiri. Kemampuan merencanakan ini menjadi target utama dari program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, membuat masyarakat miskin mampu menyampaikan keinginan dan kebutuhan mereka serta merencanakan program perlu difasilitasi secara serius oleh pemerintah, termasuk Pemda di wilayah Nusa Tenggara.

Inti pendekatan partisipatif sendiri adalah pemberdayaan masyarakat yang diharapkan mampu mendukung pembangunan manusia secara berkelanjutan. Paradigma pembangunan yang berfokus pada manusia memberikan implikasi bahwa manusia atau masyarakat sebagai subyek pembangunan dan mereka harus aktif di dalam pembangunan itu. Misalnya, masyarakat sebagai pengkaji akan mengungkapkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, sebagai perencana yang akan membuat program-program untuk memecahkan masalah dan sebagai pelaksana pembangunan akan melaksanakan berbagai program yang dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, dalam pendekatan partisipatif masyarakat didorong untuk mengembangkan pilihan atau alternatif di dalam pemecahan masalah dan bukan sebagai pengguna ataupun hanya menunggu pemecahan masalah yang ditawarkan oleh pihak luar.

Di samping itu, pendekatan partisipatif bertujuan untuk mewujudkan perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat agar ketimpangan dan ketidakadilan dapat dihindarkan, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil

pembangunan secara adil dan merata dan pada gilirannya kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Mengembangkan pendekatan partisipatif berarti juga melaksanakan pendidikan masyarakat, artinya orang luar tidak menggurui tetapi cukup sebagai fasilitator untuk saling belajar dan membagi pengetahuan dan pengalaman dengan masyarakat.

Selama ini dalam berbagai pengertian pembangunan, aktivitas masyarakat mulai perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, terbatas sebagai pelaksana dan objek pembangunan. Dalam kaitannya dengan teknologi pertanian misalnya, aktivitas masyarakat belum pada posisi yang menentukan jenis teknologi pertanian untuk pembangunan diwilayahnya. Hal tersebut dapat terjadi karena semua program bersifat “*top down*” dan masyarakat dianggap tidak mengerti masalah pembangunan. Padahal justru orang luar yang sebenarnya tidak tahu kondisi masyarakat setempat, tetapi merasa lebih tahu bahkan perannya lebih dominan. Akibatnya potensi sumber daya manusia sektor pertanian berkembang relatif lambat. Demikian pula kemandirian masyarakat menjadi rendah dan pada umumnya mereka selalu menunggu uluran tangan dari luar. Sampai saat ini sangat jarang suatu program pembangunan berasal dari bawah, termasuk program pembangunan pertanian.

Dalam kaitannya dengan BPTP di Bali, NTB dan NTT, ternyata selama ini program-program yang direkomendasikan sebagai hasil pengkajian relatif kurang mendapat tanggapan masyarakat. Penyebab hal ini adalah karena selama ini masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam menentukan suatu program pengkajian, sehingga keberlanjutan suatu program pengkajian sulit diwujudkan. Sebenarnya setelah suatu kegiatan pengkajian berakhir, dengan mudah dapat dibandingkan antara kegiatan-kegiatan yang partisipatif dan yang tidak partisipatif. Di sini dapat diketahui beda antara dua pendekatan tersebut dalam hal keberlanjutan dari pengkajian tersebut. Menyadari akan hal-hal tersebut diatas, maka di masa datang pendekatan partisipatif dalam pembangunan, khususnya pembangunan pertanian, termasuk peternakan harus menjadi pertimbangan serius di pihak Pemda di Wilayah Nusa Tenggara.

Penggunaan pendekatan partisipatif – kalau dapat digunakan dengan benar – akan mampu mengatasi pemasalahan rendahnya adopsi paket teknologi selama ini. Pendekatan ini memungkinkan diwujudkannya teknologi yang benar-benar dibutuhkan oleh calon pengguna dan merupakan kebutuhan masyarakat. Berhubung teknologi tersebut dipersiapkan bersama-sama masyarakat, maka keinginan masyarakat untuk menggunakan teknologi tersebut akan menjadi lebih besar. Dengan demikian teknologi tersebut akan berkelanjutan karena manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat sendiri.

Senang atau tidak senang, dengan penggunaan pendekatan partisipatif akan terjadi berbagai pembalikan dari pendekatan yang selama ini digunakan. Misalnya, dari model tertutup menjadi terbuka, dari individu ke kelompok, dari verbal ke visual dan dari menghitung ke membandingkan. Pada pendekatan partisipatif lebih menekankan pada keputusan kelompok yang diambil secara

demokratis dan tidak ada individu yang lebih dominan dari yang lain. Anggota kelompok akan saling membantu dan berbagi berbagai pengalaman sehingga terjadi pemberdayaan. Disini masyarakat bertindak sebagai pelaku; informasi dibangun secara kumulatif dan pengecekan dilakukan secara otomatis. Disadari bahwa suatu diskusi akan menjadi lebih menarik kalau setiap orang yang ada di kelompok memahami apa yang mereka lakukan, tujuan serta manfaatnya.

Sejak akhir tahun 1980 an pendekatan pembangunan melalui *Participatory Rural Appraisal (PRA)* telah diperkenalkan pada perencanaan yang dapat mendukung perencanaan yang lebih bersifat "*bottom up*", demokratis, berdasarkan pada keanekaragaman nilai sosial masyarakat, sistem kerja yang berkelanjutan serta untuk mendorong partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Bagi BPTP Bali, NTB dan NTT, pelaksanaan PRA telah menjadi bagian dari kegiatan rutinnya, menyusul pelatihan PRA beberapa tahun yang lalu. Misalnya, dalam rangka pengembangan agribisnis sapi Brahman di Sumba Timur telah dilakukan PRA sebagai acuan untuk merancang program aksi (Yusup *et al.*, 2002). Dengan melibatkan masyarakat sejak identifikasi masalah sampai dengan pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi program, maka pembangunan termasuk pembangunan peternakan akan menjadi berkelanjutan karena dilakukan dengan memperhatikan pembangunan manusia, lingkungan alam serta menggunakan teknologi sederhana. Berikut ini diberikan beberapa prinsip dalam rangka memperjelas pengertian pendekatan partisipatif itu:

1. Prinsip belajar dari masyarakat dan menghargai perbedaan. Artinya, pengakuan akan adanya pengetahuan tradisional masyarakat. Pengalaman dan pengetahuan masyarakat dan orang luar saling melengkapi dan mempunyai nilai yang sama.
2. Prinsip keberpihakan atau mengutamakan yang terabaikan, yaitu mengutamakan masyarakat yang terabaikan sehingga mereka memperoleh suatu kesempatan untuk memperoleh dan memiliki peran dalam pembangunan serta mendapat manfaat dari program pembangunan itu. Disini juga diusahakan pencapaian keseimbangan perlakuan terhadap berbagai golongan yang terdapat dalam masyarakat dengan mengutamakan golongan yang miskin atau yang tidak berdaya.
3. Prinsip pemberdayaan masyarakat. Artinya, peningkatan kemampuan masyarakat di dalam proses pengkajian keadaan, pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan, penilaian dan koreksi terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.
4. Prinsip mengikutsertakan semua kelompok masyarakat. Seperti dimaklumi masyarakat bukan merupakan kelompok yang homogen tetapi berbeda kelas, etnik, agama, jenis kelamin dan umur. Sehingga pimpinan formal, tokoh masyarakat dan kelompok tertentu tidak bisa mewakili masyarakat secara umum.

5. Prinsip masyarakat sebagai pelaku dan orang luar sebagai fasilitator. Orang luar harus menyadari perannya sebagai fasilitator yang membantu masyarakat untuk menganalisis situasi mereka sendiri. Peran orang luar bukan sebagai guru, penyuluh ataupun instruktur sehingga perannya diusahakan secara bertahap berkurang.

Lebih lanjut, secara sederhana partisipasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk keterlibatan. *Pertama*, partisipasi kualitatif yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan di dalam berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada (penilaian dari segi bobot keikutsertaan). *Kedua*, partisipasi kuantitatif yaitu tingkat keikutsertaan yang dihitung dari jumlah kehadiran (penilaian keikutsertaan secara fisik). Oleh karena itu dalam hubungannya dengan judul tulisan, yakni mengembalikan Nusa Tenggara sebagai gudang ternak, maka program peternakan partisipatif diartikan sebagai program yang proses perakitannya sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasinya melibatkan masyarakat - sebagai pihak yang tidak dapat diabaikan - secara aktif. Agar suatu program peternakan dapat disebut sebagai program yang partisipatif, maka ada beberapa persyaratannya, yaitu (Reijntjes *et al.*, 1992): (1) program tersebut merupakan program yang dibutuhkan masyarakat, (2) program tersebut dirancang dengan partisipasi aktif masyarakat sebagai calon pelaksana dan penerima manfaat program, (3) program tersebut berkelanjutan dan (4) program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengguna. Secara umum pendekatan partisipatif adalah suatu proses yang mengakomodasikan interaksi intensif dan kreatif antara masyarakat setempat dengan fasilitator (baca: peneliti dan penyuluh dari luar).

TANTANGAN UNTUK PEMDA DI WILAYAH NUSA TENGGARA

Dalam rangka mengembalikan Nusa Tenggara sebagai gudang ternak, tentu diperlukan kerja keras dari seluruh komponen pelaku pembangunan peternakan di wilayah tersebut, terutama pihak Pemda di semua tingkatan. Keinginan menjadi gudang ternak tersebut harus diwadahi dalam suatu program yang sifatnya *multi years* melalui komitmen tinggi dari para pengambil kebijakan. Suatu “gerakan” harus dimulai dari aparat Pemda sendiri untuk benar-benar memahami filosofi dan pelaksanaan pembangunan partisipatif. Melalui pemahaman dari seluruh aparat Pemda yang terlibat di dalam pembangunan peternakan, maka persamaan persepsi seluruh pelaksana dapat diwujudkan, sehingga seluruh potensi mengarah ke satu sasaran yang diinginkan, yakni mengembalikan Nusa Tenggara sebagai gudang ternak. Dengan kata lain, pendekatan partisipatif tersebut bukan hanya datang dari aparat pemerintah, tetapi juga merupakan keinginan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kaitan ini, seorang pekerja pembangunan, harus mampu menempatkan dirinya sebagai agen perubahan yang akan selalu menjadikan

masyarakat sebagai mitra kerja atau patner. Gudang ternak berarti terjadinya peningkatan populasi ternak dan ini hanya dapat dilakukan kalau peternak mampu beternak secara menguntungkan. Untuk itu teknologi bidang peternakan dari hulu sampai hilir harus dikuasai oleh masyarakat peternak. Penguasaan teknologi memungkinkan berbagai program peternakan dapat dirancang dengan tidak melupakan bahwa program pemberdayaan peternak harus merupakan langkah awal. Agar masyarakat paham terhadap tujuan Pemda untuk mewujudkan gudang ternak di masa datang, Pemda harus mewujudkannya melalui berbagai sosialisasi yang terprogram dengan baik. Tanpa melakukan sosialisasi, keinginan Pemda di wilayah tersebut akan tetap hanya menjadi keinginan Pemda setempat, tanpa dukungan aktif masyarakat.

Satu contoh kasus yang sering dikeluhkan masyarakat NTT dalam mengusahakan ternaknya adalah masalah pencurian ternak. Dampak negatif pencurian tersebut adalah rasa enggan masyarakat memelihara sapi dalam jumlah banyak karena risiko yang begitu tinggi. Pertanyaan selanjutnya adalah, mampukah Pemda NTT menjamin rasa aman bagi orang yang memelihara sapi? Artinya, dengan memelihara sapi, orang akan dapat menikmati jerih payahnya. Jaminan aspek keamanan ini cukup penting untuk direalisasikan kalau skala pemilikan ingin ditingkatkan. Hal ini berarti pula adanya jaminan keuntungan bagi peternak. Pencurian ternak mungkin akan berkurang kalau jumlah orang miskin dapat ditekan, dengan mengusahakan setiap orang mempunyai mata pencaharian dan sumber pendapatan yang layak. Dengan kata lain, pencurian dapat ditanggulangi kalau orang miskin dapat dijadikan tidak miskin dengan berbagai kegiatan yang produktif dan ini merupakan esensi dari program pemberantasan kemiskinan.

Seperti yang terjadi di tempat lain, di wilayah Nusa Tenggara ini seolah-olah Pemda sudah kewalahan menghadapi kompleknya permasalahan pemberantasan kemiskinan ini. Pada umumnya permasalahan kemiskinan ingin diselesaikan dengan seketika dengan mengerahkan segala daya dan upaya. Sementara diketahui bahwa sumberdaya masyarakat miskin begitu terbatas, tidak sebanding dengan kebutuhan mereka yang begitu besar dan mendesak. Mereka – masyarakat miskin di desa – pada umumnya dalam kurun waktu tertentu hanya mampu menangani beberapa masalah saja, sesuai dengan kapasitas mereka. Dalam hal ini pihak Pemda harus mampu memfasilitasi mereka dalam memutuskan permasalahan yang menduduki prioritas tertinggi dan untuk segera ditangani secara efisien.

Pertanyaan yang perlu direnungkan adalah “Siapakah yang mempunyai keinginan untuk mengembalikan Nusa Tenggara sebagai gudang ternak di masa yang akan datang? Pemda sendiri atau Pemda bersama-sama dengan masyarakat, termasuk masyarakat miskin tersebut” Kalau jawabannya adalah yang pertama, maka dapat diperkirakan bahwa program tersebut akan tidak berlanjut. Sebaliknya kalau jawabannya yang ke dua, maka program tersebut akan mampu menyentuh hati masyarakat dan keberlanjutannya dapat diharapkan.

Dengan adanya keinginan untuk mengembalikan status Nusa Tenggara sebagai gudang ternak, tampaknya Pemda setempat sudah bertekad untuk memulai babak baru dalam upaya memajukan usaha peternakan, mengingat potensi wilayahnya sampai saat ini memang sesuai untuk peternakan. Dengan telah teridentifikasinya potensi wilayah, berarti dapat pula diasumsikan bahwa lokasi pengembangan peternakan sudah dapat teridentifikasi. Tahap berikutnya adalah membuat perencanaan yang luwes serta menghimpun partisipasi masyarakat. Perencanaan memang harus luwes karena disadari bahwa program pembangunan pertanian tergantung pada sejumlah variabel yang terus menerus berubah, seperti ketersediaan teknologi tepat guna, harga dan tingkat permintaan, ketersediaan input produksi, fasilitas transportasi dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang tidak terduga pada satu atau dua variabel tersebut di atas menjadikan program harus mengadakan perubahan dalam pelaksanaannya. Dalam kaitan dengan perencanaan yang luwes ini, tidak banyak program yang dapat bertahan dengan rancang bangun yang kaku, sedangkan program yang berhasil minimal mengalami perbaikan besar setelah menyadari bahwa rencana semula tidak aplikatif (Morss *et al.*, 1975). Perencanaan yang luwes, tentu saja harus mengikutkan partisipasi masyarakat.

Pengalaman menunjukkan bahwa pada tahap awal suatu program, umumnya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi masih terbatas, karena hal seperti itu merupakan sesuatu yang baru bagi mereka. Namun dengan berjalannya waktu, pengalaman bertambah pula dan kemampuan untuk berpartisipasi juga meningkat. Perencanaan yang luwes akan memungkinkan masyarakat lokal berpartisipasi aktif, dalam menentukan, merencanakan dan melaksanakan suatu program perlu diwujudkan (Adnyana dan Basuno, 2000).

Minimal ada lima alasan mengapa partisipasi masyarakat penting dalam suatu perencanaan, yaitu (Bunch, 2001): (1) mampu memacu semangat masyarakat karena mereka merasa telah ikut serta dalam perencanaan, (2) masyarakat akan berkepentingan dalam mengusahakan keberhasilan program tersebut, karena mereka telah ikut menyumbang gagasan (3) masyarakat akan lebih memahami rumitnya pengembangan suatu program, sehingga menghapus kecurigaan mereka terhadap program yang sedang dilaksanakan, (4) keterlibatan masyarakat dapat memberi kepercayaan dan harga diri bagi masyarakat yang bersangkutan, (5) masyarakat setempat tentu jauh lebih tahu keadaan tempat tinggalnya, keinginan dan perasaan dari penduduk setempat. Di sini perlu ditekankan bahwa setiap program yang tidak menggunakan pengetahuan masyarakat, termasuk teknologi lokal, dalam perencanaannya layaknya seperti orang berjalan sambil menutup mata.

Target yang diinginkan dalam kaitannya untuk mengembalikan Nusa Tenggara sebagai gudang ternak bukan hanya sekedar meningkatkan produksi ternak, tetapi yang jauh lebih penting justru mengajar masyarakat untuk

meneruskan proses peningkatan usaha peternakan mereka. Dengan berpartisipasi dalam perencanaan, masyarakat akan belajar untuk melanjutkan proses tersebut. Meskipun partisipasi masyarakat dalam perencanaan begitu penting, sayang pangalaman selama ini menunjukkan bahwa mereka jarang dilibatkan di dalam proses tersebut. Umumnya perencanaan dilakukan oleh pengambil kebijakan di kota, meskipun seringkali secara singkat masyarakat dikunjungi dan dikumpulkan untuk memperoleh legimitasi bahwa masyarakat telah diikuti dalam perencanaan. Selanjutnya kalau pelaksanaan program tidak sesuai dengan harapan, maka seringkali masyarakat yang dipersalahkan dengan pemberian predikat tradisional, konservatif atau bahkan dianggap tidak partisipatif. Padahal yang sebetulnya terjadi adalah program yang tidak tepat atau perencanaan sepihak yang buruk dan *top down*.

Kalau pada tahap awal penentu kebijakan di beberapa Pemda tersebut mampu memahami pembangunan yang partisipatif dan kemudian memberi pemahaman tentang pentingnya pendekatan partisipatif kepada seluruh aparatnya yang bertugas di subsektor peternakan, terutama para pelaksana lapang, maka diharapkan pelan tetapi pasti keinginan untuk mengembalikan wilayah Nusa Tenggara sebagai gudang ternak dapat terealisasi. Pepatah mengatakan bahwa perjalanan seribu kilo meter pun harus dimulai dengan ayunan langkah pertama.

Mungkin menjadi pertanyaan di sini seberapa besar program yang harus dilaksanakan untuk mencapai target tersebut? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, menarik untuk disimak yakni pada umumnya program berskala besar melibatkan jumlah dana yang besar, sehingga program tersebut lebih digerakkan oleh kekuatan uang dan bukan oleh kekuatan semangat dan keyakinan. Salah satu bahaya dari suatu program besar adalah tiadanya umpan balik yang jujur dari masyarakat setempat, karena semuanya ditentukan oleh pihak-pihak yang menguasai uang. Disamping itu, program besar juga sukar diubah dan disesuaikan, karena keberlangsungan pekerjaan beberapa orang tergantung pada program tersebut. Jadi yang akan menjadi pemacu untuk mewujudkan Nusa Tenggara sebagai gudang ternak adalah semangat masyarakat, bukan dana. Untuk itu, pada awal program Pemda di Nusa Tenggara harus mampu menumbuhkan semangat ini.

Sebaliknya program yang kecil dapat dilaksanakan di wilayah yang relatif lebih kecil yang cenderung mempunyai tingkat homogenitas yang lebih tinggi dalam hal kebudayaan, iklim dan usahataninya. Oleh karena itu program yang kecil dimungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dengan berjalannya waktu dan pengalaman yang diperoleh masyarakat. Disamping itu, program yang kecil lebih memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dan memberi umpan balik yang jujur. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan program dapat berubah sesuai dengan masukan masyarakat (Batten, 1957).

MEWUJUDKAN PARTISIPASI DALAM PENGKAJIAN PERTANIAN

Dalam rangka menyusun program untuk mengembalikan Nusa Tenggara sebagai gudang ternak, maka tidak dapat dipungkiri peran teknologi pertanian, khususnya peternakan. Di depan telah disinggung betapa pentingnya pemberdayaan peternak secara partisipatif. Secanggih apapun teknologi yang ada, kalau pelaku tidak mampu mengaplikasikan, maka tidak banyak artinya. Di sini teknologi pertanian partisipatif dapat diartikan sebagai teknologi yang proses rekayasanya memerlukan pendekatan secara partisipatif, berbeda dengan teknologi yang selama ini dikenal.

Selama ini teknologi umumnya dikembangkan oleh para pengkaji melalui penelitian, baik yang dilaksanakan di kebun percobaan atau laboratorium maupun di lahan petani sampai memperoleh paket teknologi. Karena tingkat produksinya lebih tinggi, paket teknologi yang dihasilkan dianggap lebih baik jika dibandingkan dengan teknologi petani. Langkah berikutnya adalah menyampaikan paket teknologi tersebut ke penyuluh untuk selanjutnya dapat disampaikan ke petani. Namun karena persyaratan produksinya di luar kemampuan finansial petani, maka untuk sementara diperkenalkan subsidi dengan harapan petani mau mengaplikasikan teknologi introduksi tersebut. Di sini, disadari atau tidak disadari sebenarnya aspek ketergantungan mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Namun karena pada umumnya pengenalan teknologi seperti itu tidak diikuti dengan pembinaan intensif dalam bentuk pendampingan, maka dengan selesainya suatu kegiatan, subsidi juga dihapus dan petani umumnya kembali kepada cara-cara lama mereka. Proses semacam ini setiap tahun diulangi di banyak lokasi di Indonesia oleh banyak lembaga penelitian, karena dianggap proses tersebut sebagai suatu proses yang baku. Jelas di sini, kalau pola semacam ini tetap akan diacu untuk mengembalikan Nusa Tenggara sebagai gudang ternak, maka tampaknya akan sulit berhasil.

Paradigma baru menghendaki bahwa paket teknologi yang dihasilkan oleh lembaga penelitian merupakan respon lembaga tersebut terhadap kebutuhan masyarakat akan teknologi tertentu. Sehingga dalam kaitannya dengan paradigma baru tersebut, paket teknologi dalam menunjang suatu program besar merupakan teknologi hasil kesepakatan antara peneliti penyuluh dengan masyarakat pengguna. Tampaknya akan banyak pembalikan-pembalikan yang terjadi kalau secara konsekwen diinginkan teknologi pertanian partisipatif, karena teknologi partisipatif akan menempatkan ilmu pengetahuan, kriteria, analisis dan prioritas petani sebagai prioritas.

Tabel 6 memberikan perbandingan antara teknologi yang diprakarsai oleh atau versi pengkaji dan teknologi yang mengedepankan kebutuhan atau versi petani (Chamber, 1992).

Tabel 6. Perbandingan antara Teknologi versi Pengkaji dan Teknologi versi Petani

	Teknologi versi pengkaji	Teknologi versi petani
Tujuan utama	Transfer teknologi	Pemberdayaan petani
Analisa kebutuhan dan prioritas dilakukan	Oleh orang luar	Oleh petani dibantu oleh orang luar
Yang ditransfer oleh orang luar ke petani	Paket teknologi, berbagai pesan dan instruksi	Metode, berbagai prinsip, keranjang pilihan teknologi
Menu	Tertentu	Dapat dipilih sesuai kebutuhan
Perilaku petani	Bertindak sesuai perintah, mengadopsi atau menolak paket	Menggunakan prinsip, metode, memilih dari keranjang pilihan, mencoba
Keinginan orang luar	Adopsi paket teknologi secara luas	Pilihan lebih banyak bagi petani. Adopsi petani meningkat
Model penyuluhan	Dari penyuluh ke petani	Dari petani ke petani
Peran penyuluh	Sebagai guru, pelatih	Fasilitator, menyediakan berbagai pilihan

PENUTUP

Dalam rangka mengembalikan status Nusa Tenggara sebagai gudang ternak, pihak Pemda setempat bersama masyarakat peternakan perlu menentukan lokasi program di wilayah yang dianggap potensial. Dukungan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan berbagai fasilitas penunjang lainnya harus kompetitif dengan wilayah lainnya. Keberhasilan program di wilayah pilihan kemudian dijadikan acuan untuk melanjutkan program serupa di wilayah-wilayah lainnya yang juga sesuai.

Pemda sepenuhnya harus berinisiatif melakukan sosialisasi tentang pemahaman pendekatan pembangunan yang partisipatif kepada seluruh aparatnya. Pemahaman ini akan berdampak positif terhadap cara pandang aparat Pemda tentang pembangunan peternakan yang partisipatif. Pemanfaatan institusi pengkajian, seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang ada di masing-masing provinsi untuk melaksanakan sosialisasi tersebut, merupakan salah satu bentuk efisiensi Pemda.

Melalui pendekatan partisipatif, Pemda perlu menentukan strategi pengembangan peternakan dalam rangka mengembalikan statusnya sebagai gudang ternak. Prinsip pelan tapi pasti perlu diadopsi oleh jajaran Pemda di Nusa Tenggara untuk mencapai target program secara optimal. Demikian pula program tersebut lebih baik di mulai dari program yang kecil namun secara bertahap

berkembang, dibanding dengan melaksanakan program yang besar secara sekaligus tetapi tidak berlanjut.

Pihak Pemda perlu menyadari sepenuhnya kemampuan masyarakat pertanian untuk membangun diri mereka sendiri dengan memberikan peluang yang tepat. Karena berbagai keterbatasan yang dimiliki masyarakat pertanian saat ini, maka Pemda berkewajiban menjadikan semangat masyarakat untuk membangun sebagai modal dan menyediakan berbagai bentuk fasilitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana M. O. dan E. Basuno. 2000. Improvisasi *indigenous technology* dalam pengembangan pertanian lahan rawa berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional: Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Lahan Rawa, Cipayung 25-27 Juli 2000.
- Anonym. 1997. Rencana Strategis. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Naibonat 1997-2007.
- Anonym. 1999. Laporan Tahunan Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bamualim, A. 1994. Usaha Peternakan di Nusa Tenggara. Proceeding Seminar Pengolahan dan Komunikasi Hasil-hasil Penelitian Peternakan. Temu Aplikasi Paket Teknologi Pertanian di Kupang. 1-3 Februari 1994.
- Bamualim, A. dan R.B. Wirdahayati. 1996. Status dan Upaya Perbaikan Pakan dan Reproduksi Ternak Sapi di Nusa Tenggara Timur. Prosiding Seminar Komunikasi Hasil-hasil Penelitian Pertanian Nusa Tenggara, BPTP Naibonat.
- Batten, T.R. 1957. Communities and Their Development, an Introduction Study with Special Reference to The Tropic. Oxfor University Press, London. Buku Statistik Peternakan. 2002. Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan. Jakarta.
- Bunch, R. 2001. Dua Tongkol Jagung. Pedoman Pengembangan Pertanian Berpangkal pada Rakyat. Yayasan Obor Indonesia untuk WORLD NEIGHBOURS. Jakarta.
- Chamber, R. 1992. Farmer first: The Professional Revolution. In Daniels P.W., Holden S., Lewin E., and Sri Dadi (eds). Livestock Services for Smallholders. Proceeding of an International Seminar held in Yogyakarta, Indonesia 15-21 November 1992.
- Liem, C., H.H. Marawali, A. Kedang, A. Bamualim, R.B. Wirdahayati, Yusuf dan J. Nulik. 2000. Analisis Pemasaran Ternak Sapi Potong di Nusa Tenggara.
- Morss, E. R., *et al.* 1975. Strategies for Small Farmer Development, An Empirical Study of Rural Development Projects, Vol. 1. Mimeografi; Development Alternatives, Inc. Washington DC.
- Nono, O.H., A. Keban, D.B. Osa, Y. Ngongo, A. Kedang. 2000. Kajian Profil Usaha Peternakan Sapi Ongole di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Kerjasama dengan Proyek Penelitian Sistem Usahatani Nusa Tenggara (PSUNT/NTAADP) BPTP Naibonat.

- Oakley, P. and D. Marsden. 1984. Approaches to Participation in Rural Development. Published on Behalf of the ACC Task Force on Rural Development, International Labour Office, Geneva.
- Pretty, J.N. 1995. Regenerating Agriculture: Policies and Practice for Sustainability and Self-reliance. Earthscan, London.
- Rangkuti, M. dan A.R. Siregar. 1997. Peternakan dan Sistem Usahatani Kawasan Timur Indonesia. Prosiding Seminar Regional Hasil-hasil Penelitian Pertanian Berbasis Perikanan, Kupang, 28-30 Juli 1997. Kerjasama BPTP dengan Departement of Primary Industry and Fisheries Darwin, Northern Territory, Australia.
- Reijntjes, C., Haverkort, B. and Waters-Bayer, A. 1992. Farming for the Future, An Introduction to Low-External-Input and Sustainable Agriculture, The Macmillan Press Ltd.
- Wirdahayati, R.B., A. Pohan, P.TH. Fernandez, A. Bamualim. 1997. Prosiding Seminar Regional. Hasil-hasil Penelitian Pertanian Berbasis Perikanan, Peternakan dan Sistem Usahatani Kawasan Timur Indonesia, Kupang, 28-30 Juli 1997. Kerjasama BPTP Naibonat dengan Departement of Primary Industry and Fisheries Darwin, Northern Territory, Australia.
- Yusuf, Wirdahayati, Haruna, Cornelius Liem, Lukas Kia Gega dan A. Pohan. 2002. Pemahaman Pedesaan Secara Partisipatif (*Participatory Rural Appraisal*) pada Pengkajian Identifikasi Wilayah Pengembangan Agribisnis Sapi Brahman di Kabupaten Sumba Timur. Laporan Penelitian, Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTT.